

**PENGARUH KEBIJAKAN APBD PEMKAB SUKOHARJO
TERHADAP KETAATAN MATA ANGGARAN BIAYA PENDIDIKAN
DI SMA N 1 TAWANGSARI TAHUN 2011**

Lita Nurhayati, Sukirman, Sohidin
Pendidikan Akuntansi, FKIP Universitas Sebelas Maret
Surakarta, 57126, Indonesia
lita_nurhayati@yahoo.com

ABSTRAK

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui kebijakan APBD Pemkab Sukoharjo terhadap alokasi dana pendidikan, serta alokasi mata anggaran biaya pendidikan di SMA N 1 Tawang Sari. Selain itu untuk mengetahui pengaruh kebijakan APBD Pemkab Sukoharjo terhadap ketaatan penggunaan mata anggaran di SMA N 1 Tawang Sari tahun 2011.

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif. Sumber data berasal dari SMA N 1 Tawang Sari. Metode pengumpulan data menggunakan metode wawancara, metode observasi, dan dokumentasi atau arsip. Uji validitas data menggunakan teknik triangulasi sumber. Analisis data menggunakan analisis tema, yang berusaha menemukan hubungan-hubungan yang terdapat pada domain-domain yang dianalisis.

Hasil penelitian ini adalah kebijakan APBD Pemkab Sukoharjo menggunakan sistem pendidikan gratis dengan alokasi dana yang dianggarkan sebesar Rp.582.427.966.000,00 yang dibagi dalam 9 program kerja. Sedangkan untuk alokasi dana di SMA N 1 Tawang Sari, pada tahun 2011 dianggarkan sebesar Rp.802.472.000,00 yang dibagi dalam 18 pos anggaran. Dalam hal pengaruh kebijakan APBD Pemkab Sukoharjo terhadap ketaatan mata anggaran di SMA N 1 Tawang Sari menunjukkan bahwa kebijakan alokasi anggaran Pemkab Sukoharjo menyebabkan realisasi anggaran yang tidak maksimal, alokasi dana di SMA N 1 Tawang Sari juga belum dapat terealisasi secara keseluruhan disebabkan adanya kendala-kendala yang belum dapat diselesaikan.

Simpulan penelitian menunjukkan bahwa kebijakan anggaran yang telah dibuat oleh Pemkab Sukoharjo belum dapat dilaksanakan sepenuhnya oleh SMA N 1 Tawang Sari disebabkan adanya beberapa kesulitan yang dihadapi oleh pengelola dana yaitu penerimaan dana yang tidak terjadwal dengan baik serta adanya dana yang diperoleh oleh pihak sekolah sulit untuk diSPJkan karena pengeluaran yang dibutuhkan di lapangan berbeda dengan rencana anggaran yang telah ditetapkan oleh Pemkab.

Kata kunci: kebijakan APBD, mata anggaran, biaya pendidikan

ABSTRACT

The objective of research was to find out the APBD (Local Income and Expense Budget) policy in Sukoharjo Regency Government on tuition allocation, and the tuition budget item allocation in SMA N 1 Tawang Sari. This research also aimed to find out the effect of APBD policy in Sukoharjo Regency Government on the compliance with tuition budget item in SMA N 1 Tawang Sari in 2011.

This study was a qualitative research. The data source derived from SMA N 1 Tawang Sari. The methods of collecting data used were interview, observation, and documentation or archive. The data validation was carried out using source triangulation. The data analysis was conducted using theme analysis, attempting to find the relationship existing in the domains analyzed.

The result of research showed that the APBD policy of Sukoharjo Regency employed free education system with fund allocation budgeted of IDR 582,427,966,000.00 divided into 9 work programs. Meanwhile the fund allocation budgeted in SMA N 1 Tawang Sari in 2011 was IDR 802,472,000.00 divided into 18 budget posts. Regarding the effect of APBD policy in Sukoharjo Regency Government on the compliance with tuition budget item in SMA N 1 Tawang Sari, it could be seen that the Sukoharjo Regency's policy of budget allocation resulted in non-maximal budget realization, and the fund allocation in SMA N 1 Tawang Sari had not been realized because there were some unresolved obstructions.

The conclusion of research showed that the budget policy developed by Sukoharjo Regency had not been implemented to SMA N 1 Tawang Sari because of some unresolved difficulties the fund manager faced in the term of non well-scheduled fund receiving and of school management's responsibility for the fund because the expenses needed in the field were different from the planned budget specified by Regency Government.

Keywords: APBD policy, budget item, tuition.

PENDAHULUAN

Pada masa orde baru, pemerintahan yang bersifat sangat sentralistik mengakibatkan adanya ketimpangan dalam pendapatan dan pengelolaan antara keuangan daerah dan pusat, sumber daya yang cukup potensial yang dimiliki oleh daerah sebagian besar dikirim ke pusat, sehingga daerah akan memiliki ketergantungan yang tinggi kepada

pusat. Ancaman disintegrasi bangsa semakin meningkat pada akhir tahun 1999 dan awal tahun 2000 yang ditandai dengan keinginan beberapa daerah seperti Aceh, Riau, Sulawesi Selatan dan Papua untuk mencoba memisahkan diri dari Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Untuk mengatasi hal tersebut sejak 1 Januari 2001, Republik

Indonesia menerapkan desentralisasi (otonomi daerah) yang didasarkan pada Undang Undang No.22 Tahun 1999 tentang pemerintah daerah dan Undang Undang No.25 Tahun 1999 tentang perimbangan keuangan antara pusat dan daerah. Undang Undang Tahun 1999 pada prinsipnya mengatur mengenai penyelenggaraan Pemerintah Daerah yang lebih mengutamakan asas desentralisasi. Tidak sampai berumur empat tahun, Undang-Undang ini direvisi lagi dan akhirnya diganti dengan Undang Undang No.32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah dan Undang-Undang No 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Pusat dan Daerah.

Secara konseptual, otonomi memiliki tiga dimensi, yaitu politik dalam bentuk wewenang untuk mengambil keputusan kebijakan, administrasi, dan keuangan. Otonomi khususnya dalam hal keuangan akan berpengaruh dalam berbagai sektor didalam masyarakat, tak terkecuali sektor pendidikan yang merupakan salah satu sektor yang menjadi tujuan utama pembangunan daerah. Dengan otonomi daerah Pemda/Pemkab berhak menyusun anggaran di

daerahnya sendiri. Indra Bastian (2005) menyebutkan anggaran dapat diinterpretasikan sebagai paket pernyataan perkiraan penerimaan dan pengeluaran yang diharapkan akan terjadi dalam satu atau beberapa periode mendatang.

Pemda yang merupakan organisasi sektor publik harus dapat merencanakan anggaran daerahnya seefektif mungkin agar tujuan organisasi dapat terpenuhi. Dalam perencanaan anggaran ada beberapa tahapan yang harus dilakukan, Mardiyasmo (2001) menyebutkan bahwa terdapat 4 tahap dalam penyusunan anggaran sektor publik, yaitu (1) tahap persiapan dan penyusunan anggaran (*budget preparation*) (2) tahap ratifikasi anggaran (3) tahap pelaksanaan anggaran (*budget implementation*) (4) tahap pelaporan dan evaluasi anggaran. Dengan berbagai tahapan yang dilalui diharapkan APBD dapat memenuhi kebutuhan berbagai sektor di daerah.

Tidak dapat dipungkiri bahwa dana merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dalam pengelolaan institusi pendidikan, dalam hal ini

adalah sekolah. Sekolah memiliki Rencana Pendapatan dan Belanja Sekolah (RAPBS) yang digunakan sebagai acuan dalam pengelolaan dana yang diterima oleh pihak sekolah dari Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah. Harsono (2007) menyebutkan bahwa RAPBS (*Budget Sekolah*) adalah rencana operasional yang dinyatakan secara kuantitatif dalam bentuk satuan uang yang digunakan sebagai pedoman dalam melaksanakan kegiatan-kegiatan lembaga dalam kurun waktu tertentu. Oleh karena itu, dalam anggaran tergambar kegiatan-kegiatan yang akan dilaksanakan oleh suatu lembaga. Segala hal yang dilakukan oleh sekolah harus tercover di RAPBS tersebut, jika tidak kegiatan tersebut haruslah diprogramkan di tahun depannya. Dengan RAPBS inilah semua kegiatan yang akan dilaksanakan sekolah direncanakan, tidak sekedar teknis pelaksanaan tetapi juga non teknis, dalam hal ini pendanaannya, dana yang didapatkan dari pemerintah dan masyarakat serta dana bantuan lain yang mungkin didapatkan sekolah, diatur menjadi

sedemikian rupa agar dalam penggunaannya jelas dan terbuka untuk membiasakan keterbukaan dalam sistem manajemen.

Untuk menyusun RAPBS ini, maka perlu dikoordinasikan dengan beberapa pihak sehingga tidak terjadi kesalahpahaman antara pihak-pihak yang terlibat. Setiap unsur dari stakeholder diharapkan akan dapat memberikan kontribusi lebih pada penentuan kegiatan yang akan dilakukan oleh pihak sekolah dengan perhitungan dana yang dibutuhkan, sehingga ada informasi kebutuhan dana. Informasi kebutuhan dana inilah yang sebenarnya kita butuhkan melalui proses koordinasi personal terkait dengan kegiatan sekolah yang selanjutnya, informasi kebutuhan dana ini dimasukkan ke dalam rencana anggaran pendapatan dan belanja sekolah. Stakeholder yang kita koordinasikan adalah meliputi Kepala Sekolah, Komite Sekolah, dan Guru, ketiga komponen inilah yang sebenarnya pelaksana proses pendidikan. Dengan koordinasi yang baik, maka berbagai kegiatan sekolah dapat diback up dengan alokasi dana secara tepat, yang selanjutnya setiap

personal dapat mengetahui kondisi keuangan, kebutuhan dan kondisi yang harus disediakan. Keterlibatan komite sekolah dalam proses penyusunan RAPBS ini tidak lain sebagai perwakilan dari masyarakat sehingga masyarakat mengetahui secara jelas pendanaan yang ada di sekolah dan tingkat kebutuhan untuk proses pendidikan dan pembelajaran. Diharapkan, setelah masyarakat mengetahui kondisi keuangan sekolah, maka masyarakat dapat ikut berpartisipasi dalam pengembangan sekolah, khususnya dalam hal dana.

Dengan adanya otonomi daerah, khususnya dalam dimensi keuangan maka perlu adanya kesepahaman antara pihak sekolah dan Pemerintah Daerah agar dalam pelaksanaan anggaran pendidikan bisa berjalan dengan baik mengingat anggaran memiliki fungsi sebagai alat pengendalian dan sebagai alat kebijakan. Namun tidak dapat dipungkiri bahwa terkadang ada saja hal yang tidak sesuai antara APBD Pemerintah Daerah dan pelaksanaan dari pihak sekolah, sehingga hal tersebut akan dapat mengurangi akuntabilitas pihak sekolah maupun

Pemerintah Daerah. Berdasarkan hal tersebut, tujuan dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui kebijakan APBD Pemkab Sukoharjo terhadap alokasi dana pendidikan tahun 2011, serta untuk mengetahui alokasi mata anggaran biaya pendidikan di SMA N 1 Tawang Sari tahun 2011. Selain itu, penelitian ini juga bertujuan untuk mengetahui tentang pengaruh kebijakan APBD Pemkab Sukoharjo terhadap ketaatan penggunaan mata anggaran di SMA N 1 Tawang Sari tahun 2011.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif. Subjek dalam penelitian adalah SMA N 1 Tawang Sari. Penelitian ini menggunakan beberapa metode pengumpulan data, yang pertama metode *interview* (wawancara) terhadap kepala sekolah dan bendahara pengelola keuangan SMA N 1 Tawang Sari untuk mencari informasi dan data tentang *budget* sekolah, usaha sekolah dalam menggali dana, serta hambatan dalam pengelolaan dana. Metode yang kedua adalah metode observasi (pengamatan) yaitu dengan melakukan pengamatan

langung di lapangan. Metode yang ketiga adalah metode dokumentasi yaitu dengan mengumpulkan dokumen-dokumen yang berkaitan dengan anggaran sekolah. Uji validitas data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan teknik triangulasi. Cara analisis data pada metode ini adalah dengan membuat catatan harian hasil wawancara dengan informan dan catatan harian observasi, kemudian melakukan uji silang terhadap materi catatan-catatan tersebut untuk memastikan tidak ada informasi yang bertentangan antara catatan harian wawancara dengan catatan harian observasi. Setelah itu hasil konfirmasi itu perlu diuji lagi dengan informasi-informasi sebelumnya karena dapat jadi hasil konfirmasi itu bertentangan dengan informasi yang telah dihimpun sebelumnya dari informan atau sumber lain. Prosedur penelitian terdiri dari: (1) tahap pengenalan masalah; (2) tahap persiapan; (3) tahap observasi dan interpretasi; (4) tahap penyusunan laporan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Penyelenggaraan urusan pendidikan tahun 2011 dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Sukoharjo. Urusan ini didukung dengan jumlah pegawai sebanyak 7.063 (tujuh ribu enam puluh tiga) orang. Alokasi anggaran untuk urusan pendidikan sebesar Rp582.427.966.000,00 dan selama setahun dapat terealisasi sebesar Rp502.697.410.789,00 didukung dengan kondisi sarana dan prasarana yang lengkap dan dalam kondisi baik. Program dan kegiatan urusan pendidikan dibagi menjadi 9 program yaitu program Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), program wajib belajar pendidikan dasar Sembilan tahun, program pendidikan menengah, program pendidikan non formal, program pendidikan sekolah luar biasa, program peningkatan mutu pendidik dan tenaga kependidikan, program manajemen pelayanan pendidikan, program pendidikan kesiswaan, dan program pendidikan menengah pertama. Setiap program memiliki berbagai kegiatan untuk dilaksanakan, untuk program pendidikan menengah

terdapat 20 kegiatan yang menunjang program tersebut. 20 kegiatan tersebut adalah pembangunan gedung sekolah, penambahan ruang kelas sekolah, pengadaan buku-buku dan alat tulis siswa, pengadaan alat praktik dan peraga sekolah, pengadaan meubelair sekolah, rehabilitasi sedang/berat bangunan sekolah, pelatihan penyusunan kurikulum, menyelenggarakan lomba mapel, menyelenggarakan lomba sekolah sehat SMA/SMK, pelaksanaan Ujian Akhir Sekolah (UAS) dan semester, menyelenggarakan olimpiade sains SMA/SMK, penyelenggaraan lomba kompetensi siswa SMK, pendampingan SBI SMK, pendampingan sekolah kategori mandiri SMA, melaksanakan penerimaan siswa baru, pengembangan minat dan bakat siswa, penyelenggaraan seleksi siswa berprestasi, menyelenggarakan lomba perpustakaan sekolah, penyelenggaraan kewirausahaan siswa, penyelenggaraan uji kompetensi.

Alokasi dana SMA N 1 Tawang Sari pada tahun 2011 sebesar

Rp.803.472.000,00 yang dibagi untuk 18 pos anggaran. Pos-pos anggaran tersebut adalah jasa surat menyurat, penyediaan jasa komunikasi sumber daya air dan listrik, penyediaan jasa kebersihan kantor, penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja, penyediaan alat tulis kantor, penyediaan barang cetakan dan penggandaan, penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor, penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan, penyediaan makanan dan minuman, pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor, pemeliharaan rutin peralatan gedung kantor, pemeliharaan rutin alat-alat laboratorium, pemeliharaan rutin barang-barang perpustakaan, monitoring dan evaluasi pelaporan, pembinaan kesiswaan dan kepramukaan. Dari rencana anggaran sebesar Rp.802.472.000,00 pihak sekolah menerima dana dari Pemkab Sukoharjo selama satu tahun sebesar Rp.765.020.772,00 dan jumlah dana yang dapat di-SPJkan selama tahun tersebut sejumlah Rp.764.394.632,00 atau setara dengan 95,14%.

Pada tahun 2011 Pemkab Sukoharjo telah menggunakan system pendidikan gratis yang melarang pihak sekolah untuk memungut dana dari siswa. Dengan kebijakan APBD tersebut terdapat beberapa pengaruh terhadap ketaatan mata anggaran biaya pendidikan di SMA N 1 Tawang Sari. Pengaruh yang pertama adalah alokasi dana yang tidak sesuai dengan kebutuhan sekolah yang disebabkan karena penerimaan dana yang tidak terjadwal dengan baik.

Berdasarkan data yang penulis terima selama tahun 2011 penerimaan dana dari APBD sukoharjo diterima sebanyak 7 kali di bulan Februari, Maret, April, Juli, Oktober, November, dan bulan Desember. Namun, dengan jumlah yang berbeda di setiap bulannya. Hal ini pasti memberatkan pengelola keuangan karena harus mengelola dana yang datangnya tidak terjadwal dengan baik. Berikut ini tabel penerimaan dana di SMA N 1 Tawang Sari selama tahun 2011 :

Tabel 4. Jumlah Penerimaan Dana di SMA N 1 Tawang Sari Tahun 2011

No	Bulan	Jumlah Penerimaan
1	Januari	Rp -
2	Februari	Rp 133,912,000.00
3	Maret	Rp 66,956,000.00
4	April	Rp 181,320,165.00
5	Mei	Rp -
6	Juni	Rp -
7	Juli	Rp 191,384,683.00
8	Agustus	Rp -
9	September	Rp -
10	Oktober	Rp 125,297,514.00
11	November	Rp 26,150,410.00
12	Desember	Rp 40,000,000.00
Total		Rp 765,020,772.00

Pengaruh yang kedua adalah Dana yang digunakan sulit diSPJkan karena tidak termasuk ke dalam pos-pos RAPBS. Dana yang digunakan di SMA N 1 Tawang Sari salah satunya bersal dari pemerintah daerah. Dana yang diperoleh dari pemerintah daerah sudah diatur oleh dinas pendidikan dalam hal pengalokasiannya, sehingga dalam pelaksanaannya pihak sekolah harus menyesuaikan penggunaan anggaran tersebut sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan. Kurang adanya sinkronisasi antara pihak sekolah dan

dinas pendidikan menyebabkan pengalokasian yang tidak sesuai dengan kebutuhan riil di lapangan.

Pengaruh kebijakan APBD Pemkab Sukoharjo terhadap ketaatan mata anggaran biaya pendidikan yang ketiga adalah dengan kebijakan yang telah dibuat menyebabkan Ketaatan penggunaan mata anggaran biaya pendidikan yang belum maksimal. Dari jumlah RAPBS sebesar Rp.802.472.000,00 SMA N 1 Tawang Sari menerima dana dari APBD sebesar Rp.765.020.772,00. Dari jumlah dana APBD tersebut, jumlah yang dapat di-SPJkan sejumlah Rp.764.394.632,00 atau setara dengan 95,14%. Berdasarkan prosentase tersebut realisasi anggaran yang dicapai cukup tinggi. Namun, terdapat fakta bahwa ada hal-hal yang tidak dapat di-SPJkan yang membuat pengelola anggaran menggunakan sedikit kecurangan dalam pembuatan bukti transaksi. Dari penelitian yang penulis lakukan, terdapat penyimpangan dalam hal pelaporan penggunaan dana yang tidak sesuai, yaitu dalam hal kuitansi atau nota pengeluaran yang tidak sesuai dengan kondisi riil uang yang

dikeluarkan. Berdasarkan wawancara penulis, hal tersebut dilakukan untuk menutupi kekurangan dana untuk pos-pos yang tidak bisa di-SPJkan oleh pihak sekolah. Seperti *reward* untuk siswa berprestasi, honor guru untuk mengikuti lomba, dan hal-hal *accidental* lainnya.

KESIMPULAN

Sejak tahun 2008 Pemerintah Kabupaten Sukoharjo sudah menerapkan kebijakan pendidikan gratis untuk SD, SM, maupun SMA. Begitu pula pada tahun 2011, Pemkab juga tetap menerapkan kebijakan pendidikan gratis, sehingga pihak sekolah dilarang untuk menarik dana dari siswa dengan alasan apapun. Besar alokasi anggaran Pemkab Sukoharjo untuk urusan pendidikan pada tahun 2011 sebesar Rp582.427.966.000,00 dan selama tahun anggaran tersebut dana yang dapat direalisasikan sebesar Rp502.697.410.789,00 yang digunakan untuk 9 program kerja.

Rencana anggaran di SMA N 1 Tawang Sari pada tahun 2011 sebesar Rp.802.472.000,00 yang dibagi kedalam 18 pos anggaran. Dari rencana anggaran sebesar

Rp.802.472.000,00 pihak sekolah menerima dana dari Pemkab Sukoharjo selama satu tahun sebesar Rp.765.020.772,00 dan jumlah dana yang dapat di-SPJkan sejumlah Rp.764.394.632,00 atau setara dengan 95,14%.

Kebijakan anggaran yang telah dibuat oleh Pemkab Sukoharjo belum dapat dilaksanakan sepenuhnya oleh SMA N 1 Tawang Sari disebabkan adanya beberapa kesulitan yang dihadapi oleh pengelola dana yaitu penerimaan dana yang tidak terjadwal dengan baik yang menyebabkan sulitnya pengelolaan dana yang diterima, bahkan pihak sekolah sampai harus mencari pinjaman terlebih dahulu untuk memenuhi kebutuhan sekolah sebelum dana dari pemerintah diterima. Kesulitan lain yang dihadapi adalah adanya dana yang diperoleh oleh pihak sekolah sulit untuk di-SPJkan karena pengeluaran yang dibutuhkan di lapangan berbeda dengan rencana anggaran yang telah ditetapkan oleh Pemkab, hal ini menyebabkan dana yang ada sulit terserap secara maksimal. Kesulitan-kesulitan dalam

pengelolaan dana tersebut menyebabkan ketaatan penggunaan mata anggaran yang belum maksimal di SMA N 1 Tawang Sari.

DAFTAR PUSTAKA

- Alim, M. Nizarul. 2008. *Jurnal. Efektivitas Perpaduan Komponen Anggaran dalam Prosedur Anggaran: Pengujian Kontinjensi Matching.*
- Anonim. 2008. *Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2008 Tentang Pendanaan Pendidikan.*
www.legalitas.org (diakses tanggal 20 Maret 2012).
- Arikunto, Suharsimi. 1989. *Prosedur Penelitian.* Jakarta: Bina Aksara.
- Bungin, Burhan. 2003. *Analisis Data Penelitian Kualitatif.* Jakarta: PT Raja Grafindo.
- Bastian, Indra. 2007. *Akuntansi Yayasan dan Lembaga Publik.* Jakarta: Erlangga
- Harsono. 2007. *Pengelolaan Pembiayaan Pendidikan.*

Lita Nurhayati, Sukirman, dan Sohidin. *Pengaruh Kebijakan APBD Pemkab Sukoharjo Terhadap Ketaatan Mata Anggaran Biaya Pendidikan di SMA N 1 Tawang Sari Tahun 2011*. Jurnal "Tata Arta" UNS, Vol. 1, No. 1, hlm. 73-83 | 083

- Yogyakarta: Pustaka Book Publisher.
- Mardalis. 2002. *Metodologi Penelitian Suatu Pendekatan Proposal*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Milles, Mathew B and Huberman, A. Micael. 1992. *Analisis Data Kualitatif*. Jakarta: UI Press.
- Moleong, Lexy. 1993. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosda Karya.
- Mulyasa, E. 2006. *Menjadi Kepala Sekolah Profesional*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Nanang, Fattah. 2001. *Ekonomi dan Pembiayaan Pendidikan*. Bandung: PT Remaja Rosda Karya.
- Riant Nugroho. 2008. *Kebijakan Pendidikan yang Unggul (Kasus Pembangunan Pendidikan di Kabupaten Jembrana 2000-2006)*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- Tim Dosen Administrasi Pendidikan UPI. 2009. *Manajemen Pendidikan*. Bandung: CV Alfabeta
- Umiarso dan Imam Gojali. 2010. *Manajemen Mutu Sekolah di Era Otonomi Sekolah*. Yogyakarta: IRCiSoD
- Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2003
- Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD) Pemkab Sukoharjo tahun 2011

PENGESAHAN

Artikel ini telah dibaca dan direkomendasikan oleh pembimbing I dan pembimbing II.

Surakarta, Juli 2015

Persetujuan Pembimbing,

Pembimbing I



Drs. Sukirman, M.M.
195006171982031001

Pembimbing II



Solihin, S. E., M. Si., Akt
197201282005011001